

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM HUBUNGAN COMPREHENSIVE PARTNERSHIP DI BIDANG KEAMANAN MARITIM

INDONESIA DEFENCE DIPLOMACY WITH AUSTRALIA IN RELATIONS AS COMPREHENSIVE PARTNERSHIP ON MARITIME SECURITY FIELD

Dewi Adithyanti Pramitha¹
Universitas Pertahanan
(dewi.a.pramitha@gmail.com)

Abstrak- Paper ini merupakan hasil analisa mengenai perkembangan geopolitik Indonesia dan Australia serta pengaruhnya terhadap diplomasi pertahanan kedua negara dalam kerangka *comprehensive partnership*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, analisa data primer dan sekunder secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *comprehensive partnership* antara Indonesia – Australia berjalan dengan baik melalui terwujudnya berbagai aktivitas diplomasi pertahanan, khususnya di bidang maritim. Implikasi kajian ini menyarankan tetap dibutuhkan keseriusan pemerintah terkait dalam membuat strategi diplomasi pertahanan Indonesia (Kementerian Pertahanan), strategi kemitraan strategis dan/atau komprehensif (Kementerian Luar Negeri), dan doktrin maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) untuk pengembangan strategi diplomasi pertahanan khususnya secara bilateral.

Kata Kunci: *Indonesia, Australia, Strategi, Diplomasi Pertahanan, Comprehensive Partnership, Poros Maritim Dunia.*

Abstract- This paper is the result of an analysis of Indonesia and Australia geopolitical developments and their impacts on defense diplomacy between the two countries within the framework of the comprehensive partnership. This study uses qualitative research methods, analysis of primary and secondary data descriptively. The results showed that the comprehensive partnership between Indonesia - Australia goes well through the realization of a wide range of defense diplomacy activities, especially in the maritime field. The implications of this study suggest seriousness of the government still needed, concerned with developments of Indonesia defense diplomacy's strategy (Ministry of Defence), strategic partnerships and/or comprehensive (Ministry of Foreign Affairs) strategies, and the doctrine of maritime (Coordinating Ministry for Maritime Field) for development of defence diplomacy strategy bilaterally in particular.

Keywords: *Indonesia, Australia, Strategy, Defence Diplomacy, Comprehensive Partnership, Global Maritime Fulcrum*

¹ Dewi Adithyanti Pramitha, S.H. M.Si (Han). Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Diplomasi **Pertahanan** Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016.

Pendahuluan

Tulisan ini membahas hubungan bilateral Indonesia dan Australia dalam perkembangan geopolitik kedua negara dengan memperhatikan aspek diplomasi pertahanan, khususnya bidang keamanan maritim. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara yang bertetangga dan memiliki hubungan yang kuat berdasarkan faktor geografis dan sejarah, dinamika hubungan kedua negara tersebut dipengaruhi oleh perubahan politik pada masing-masing negara. Memiliki budaya dan tradisi yang berbeda, Indonesia dan Australia saling berbagi tujuan yang sama. Lebih dari itu, sebagai negara yang berdaulat, Australia menghormati keutuhan wilayah dan persatuan Indonesia.²

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sering mengalami pasang surut yang berdampak pada kerjasama pertahanan kedua

negara. Menyikapi hal tersebut, Indonesia berusaha meningkatkan komunikasi melalui jalur diplomatik untuk menetralisasi situasi dan selanjutnya membangun kembali hubungan ke arah yang lebih harmonis. Melihat posisi Indonesia dan Australia yang berdekatan secara geografis, menjadi sangat penting secara geopolitik bagi kedua negara ini untuk menjalin hubungan bilateral dan berkontribusi menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan. Sedangkan dalam *Defence White Paper Australia*, Australia melihat Indonesia sebagai tetangga dekat oleh karena itu hubungannya dengan Indonesia menjadi sangat penting. Terlebih dilihat dari faktor ekonomi Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga menyajikan peluang untuk membangun kesejahteraan bagi kedua negara. Di sisi lain Indonesia dan Australia juga berbagi berbagai kepentingan keamanan bersama. (Department of Defence, Australian Government, 2016).

Republik Indonesia dan Australia telah menjalin kemitraan komprehensif semenjak 4 April 2005 yang dituangkan melalui suatu dokumen resmi bernama *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia* dan ditandatangani

² Australian Government, D. o. (2005, April). Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia. Dipetik 6 Mei 2016, dari <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia.aspx>

oleh Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI periode 2004-2014) dan John Howard (Perdana Menteri Australia periode 1996-2007). Hubungan ini merupakan salah satu pencapaian tertinggi dalam hubungan diplomasi Indonesia dan Australia, dan mencerminkan interaksi tingkat tinggi antara kedua negara di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Australia selanjutnya dituangkan dalam persetujuan mengenai Kerangka Kerjasama Keamanan, yang lebih dikenal sebagai *Lombok Treaty (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation)* yang ditandatangani pada 13 November 2006 dan diratifikasi melalui UU No. 47 Tahun 2007 oleh Indonesia. Meskipun demikian, tidak jarang hubungan bilateral Indonesia – Australia yang baik, yaitu ditunjukkan dalam berbagai kesepakatan serta kerjasama kedua negara, mengalami ketegangan karena terjadi berbagai peristiwa

Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 80% wilayah laut (perairan) dan hanya 20% wilayah darat, terdiri atas gugusan pulau-pulau sebanyak ±17.499 ribu pulau dan luas wilayah perairan yang mencapai

5.900.000 km² (Marsetio, 2016). Sebagai sebuah negara maritim yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya berbasis maritim, adalah hal yang wajar jika Indonesia meningkatkan keamanan di wilayah perairannya (keamanan maritim). Pengendalian laut sangat terkait dengan kekuatan maritim yang dimiliki oleh suatu bangsa, seperti Indonesia. Pengembalian visi maritim bangsa ini penting untuk Indonesia dalam menyikapi pergeseran geopolitik dunia. Pergeseran geopolitik dunia yang terjadi dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama, pergeseran geopolitik dari kawasan Eropa ke Asia Pasifik. Kedua, geopolitik atas semakin banyaknya kekuatan yang hadir di Samudera Hindia seperti Amerika Serikat, Perancis, India, Australia dan Cina. Pergeseran geopolitik ini berimplikasi langsung terhadap Indonesia, misalnya dalam hubungan bilateralnya dengan Australia (Antariksa, 2014).

Penekanan tulisan ini terletak pada diplomasi pertahanan sebagai ilmu baru yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Terkait implementasi diplomasi pertahanan khususnya diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara lain, adalah merupakan salah satu cara untuk memahami dan memaknai diplomasi pertahanan itu

sendiri. Selain itu analisis implementasi diplomasi pertahanan penting dilakukan dalam meninjau kembali hubungan bilateral Indonesia melalui *comprehensive partnership* berdasarkan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Indonesia and Australia* tahun 2005, khususnya dalam penelitian adalah Australia di bidang keamanan maritim.

Rumusan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah menyoroti berbagai permasalahan serta tantangan dan ancaman di bidang maritim terkait perkembangan geopolitik dan hubungannya dengan diplomasi pertahanan Indonesia – Australia sebagai *comprehensive partnership*, khususnya diplomasi pertahanan. Pertanyaan besar dalam permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dinamika diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia, khususnya di bidang keamanan maritim? Adapun dalam upaya untuk mengkaji permasalahan tersebut, mencakup pula permasalahan tentang:

1. Bagaimana perkembangan geopolitik Indonesia dan Australia mempengaruhi diplomasi pertahanan melalui *comprehensive partnership*?
2. Bagaimana implementasi diplomasi pertahanan Indonesia dengan Australia di bidang keamanan maritim?

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam pendahuluan sebelumnya digunakan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada penggunaan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *in depth interview*, dokumentasi dan triangulasi. Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sebagai *human instruments* dibantu dengan alat-alat lain yang menunjang proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³

Lingkungan Strategis Indonesia Dan Perspektif Indonesia Terhadap Australia

Kementerian Pertahanan mengakui bahwa Indonesia memandang Australia sebagai negara mitra strategis di segala bidang. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa di bidang ekonomi, Australia merupakan pangsa pasar yang potensial.

³ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Di sisi pertahanan Australia merupakan sekutu utama Amerika Serikat, sehingga hal ini memberikan manfaat besar dalam kerjasama pengamanan di wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu melihat letak geografis wilayah kedua negara yang bertetangga dekat, maka segala kebijakan Australia akan mempengaruhi dan berimplikasi langsung bagi Indonesia. Sehingga apabila hubungan kedua negara tidak dapat berjalan harmonis, maka berbagai permasalahan akan terus muncul tanpa ada solusi yang saling menguntungkan kedua negara.

Menurut konsep geopolitik, Indonesia dan Australia merupakan rangkaian geografis yang tidak terpisahkan, dengan kata lain merupakan *adjacent territory* atau wilayah yang berdekatan dan berhubungan secara langsung. Rangkaian Australia – Asia Tenggara (termasuk di dalamnya Indochina dan Indonesia) merupakan alur yang secara militer sangat strategis dan kritis. Penguasaan Indochina dan Indonesia akan mengisolasi akses Australia dari dunia luar karena aliran logistik global sangat bergantung kepada *adjacent territories* tersebut.

Namun, tentunya dalam melakukan diplomasi dengan berbagai negara,

khususnya dengan Australia, Indonesia tentu memiliki kepentingan yang ingin dicapai dengan menjalin berbagai kerjasama tersebut. Hasil penelitian dalam berbagai wawancara dan penggalian data sekunder menghasilkan jawaban bahwa kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam berbagai kerjasama dengan Australia khususnya kepentingan dalam segi pertahanan dan secara umum kepentingan pada bidang lain adalah:

1. Indonesia memiliki fokus bersama di bidang keamanan yang bersifat eksternal, yaitu bidang keamanan maritim. Meskipun prioritas di bidang keamanan maritim antara Indonesia dan Australia berbeda.
2. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama di Samudera Hindia. Kepentingan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Samudera Hindia melalui forum *Indian Ocean Rim Association* (IORA).
3. Pada bidang penegakan hukum, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama pada masalah pembajakan dan perdagangan obat atau orang secara ilegal.
4. Indonesia secara jelas memiliki kepentingan untuk menjaga situasi

di Papua dalam kawasan Pasifik Selatan, terutama melalui forum kawasan yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Menyikapi perkembangan lingkungan strategis, pembangunan pertahanan Indonesia berdasarkan Buku Putih Pertahanan 2015 Indonesia adalah dilaksanakan berdasarkan kebijakan strategis pembangunan nasional yang tertuang pada RPJPN Tahun 2005-2025. Pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk membangun postur pertahanan yang tangguh dan memiliki kekuatan penangkalan sebagai negara kepulauan dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia.⁴

Lingkungan Strategis Australia Dan Perspektif Australia Terhadap Indonesia

Ditinjau dari aspek kepentingan nasionalnya, Australia memandang Indonesia strategis. Menurut Kementerian Pertahanan⁵, ada beberapa hal penting yang harus digaribawahi dalam memahami pandangan Australia terhadap Indonesia, yaitu pertama letak

geografis Indonesia yang sangat strategis bagi kepentingan Australia. Australia merupakan benua yang terletak paling selatan sehingga jalur perdagangannya sebagian besar melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Kedua, demokratisasi di Indonesia dipandang baik sehingga hal ini menjadi modal Australia untuk masuk ke dalam pemerintahan dan memperluas pengaruhnya di Indonesia. Ketiga, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim sehingga merupakan mitra utama Australia dalam melawan terorisme internasional.

Keempat, Indonesia sebagai negara ke empat dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan beragam etnis, udaya serta agama, membuat Australia memiliki kepentingan dalam menjalin persahabatan dan menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Kelima, Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar strategis bagi perdagangan Australia. Pada tahun 2050 Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan populasi terbanyak ke empat di dunia sehingga akan membawa perekonomian negara menjadi lebih besar pula.⁶

⁴ Defence Ministry of the Republic of Indonesia. (2015). *Defence White Paper 2015*. Jakarta: Defence Ministry of the Republic of Indonesia. p. 113.

⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Perkembangan Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Dalam Lima Tahun Mendatang*. Jakarta : Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

⁶ Syafputri, E. (2015, Mei 1). Indonesia Terlalu Penting Untuk Australia. (J. M. Sidik, Ed.) Indonesia. Retrieved from

Keenam, dari persepsi geopolitik dan geostrategi, Australia memandang Indonesia sebagai negara “dari dan melalui mana serangan Australia bisa dilakukan”.⁷ Khusus untuk kepentingan geopolitik dan perdagangan internasional, dalam 25 tahun ke depan fokus Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik adalah India, Indonesia, dan ASEAN.⁸ Ketujuh, kunci komunikasi alur laut (SLOC) Australia dan rute penerbangan Australia melalui Indonesia. Kedelapan, intalasi minyak dan gas alam lepas pantai proyek North West Shelf yang diekspor ke Tiongkok dan Jepang melalui selat-selat di kepulauan Indonesia.

Dalam hubungan Indonesia dengan Australia, Kementerian Pertahanan Australia menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan pengaruh regional dan global. Selama periode yang sama, dan sepadan dengan pertumbuhan ekonominya, Indonesia mungkin akan menjadi negara dengan anggaran pertahanan terbesar di Asia Tenggara.

<http://www.antaraneews.com/berita/493860/indonesia-terlalu-penting-untuk-australia>

⁷ Bhakti, I. N. (n.d.). Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang. *Jurnal Tahunan CIDES*, 2/1996, 296.

⁸ Syafputri, E. *loc. cit.*

Australia dan Indonesia berbagi banyak kepentingan keamanan bersama, termasuk perbatasan maritim bersama, komitmen untuk memerangi terorisme, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan kami dan bekerja untuk memperkuat arsitektur keamanan regional.⁹

Pada dasarnya, Australia memahami bahwa Indonesia dengan segala kekayaan sumber daya alam dan potensi manusianya merupakan perisai bagi setiap ancaman yang datang dari utara. Australia mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik, khususnya kebangkitan Tiongkok dan keberadaan Amerika Serikat di kawasan. Sehingga hal ini mendorong Australia untuk menjalin hubungan yang lebih strategis dengan negara-negara di kawasan, terutama negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of South East Asia Nations (ASEAN), sebagai *buffer zone* Australia dalam menghadapi ancaman dari utara.

Dinamika hubungan bilateral Indonesia – Australia yang naik turun adalah konsekuensi dari kedua

⁹ Department of Defence, Australian Government. (2016). *Defence White Paper 2016*. Australia: Departement of Defence.

pemerintah telah lebih terfokus pada dinamika bilateral mereka. Fokus yang sempit ini telah membuat Australia dan Indonesia mengabaikan bahwa Indonesia dan Australia berbagi berbagai prioritas yang sama dalam konteks regional. Australia dan Indonesia secara bertahap harus membingkai hubungan dengan memberikan bobot lebih lanjut untuk kepentingan mereka bersama dalam konteks regional yang lebih luas. Memfokuskan kembali dari perbedaan bilateral menuju kesamaan kepentingan regional adalah salah satu jalan terbaik menuju hubungan Australia-Indonesia lebih stabil dan tangguh.¹⁰

Sebagai *middle powers* demokrasi yang telah menikmati keamanan dan kemakmuran dari tatanan regional yang ada, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama dalam melihat perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik yang didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan norma-norma perilaku internasional. Meningkatkan rasa saling pengertian

¹⁰ Conversation, T. (2016, September 8). To Improve Their Relationship Australia and Indonesia Should Focus On Shared Geopolitical Interest. *The Conversation*. (D. Willis, Ed.) Retrieved from <http://theconversation.com/to-improve-their-relationship-australia-and-indonesia-should-focus-on-shared-geopolitical-interests-64614>

tentang bagaimana Australia dan Indonesia berbagi prioritas yang saling melengkapi dapat membantu meningkatkan ketahanan hubungan diplomasi terhadap hubungan bilateral yang tak terelakkan. Untungnya hal ini semakin diakui oleh para pemimpin di kedua negara. *Reframing* cara berpikir tentang hubungan bilateral Indonesia – Australia menuju kesadaran yang lebih besar dari kepentingan geopolitik bersama di kawasan adalah cara terbaik untuk dua tetangga ini untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dan lebih tangguh.

Poros Maritim Dunia Dan Pengaruhnya Dalam Hubungan Bilateral Indonesia Dan Australia

Poros Maritim Dunia (PMD) baru secara resmi dicanangkan Presiden Jokowi dalam bentuk pidato kenegaraan di Naypyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014 di Forum East Asian Summit ke-9.¹¹ Konsepsi Poros Maritim Dunia ini kemudian terbagi ke dalam 5 (lima) yaitu:

¹¹ Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). *Arungi Samudra Bersama Sang Naga (Sinergi Poros Maritim Dunia Dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. p.128.

1. Pilar pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Pilar kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan (ekonomi maritim);
3. Pilar ketiga, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep sea seaport*), industri perkapalan, dan pariwisata maritim (konektivitas maritim);
4. Pilar keempat, melaksanakan diplomasi maritim;
5. Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim (keamanan maritim).

Konsekuensi dari kebijakan poros maritim dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut untuk mengontrol, mengawasi dan melindungi keamanan maritim. Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional. Konsentrasi keamanan maritim

berada pada penggunaan atau manipulasi tidak sah terhadap elemen domain maritim dalam keadaan damai (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Sehingga syarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia adalah mampu menyelenggarakan tata tertib di laut dan menciptakan keselamatan di laut serta menjamin keamanan maritim.

Untuk dapat mewujudkan kembali kodrat Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat melalui visi Poros Maritim Dunia, maka diperlukan instrumen-instrumen maritim serta Angkatan Laut sebagai kekuatan militer yang kuat. Secara khusus, Angkatan Laut sebagai instrumen utama dalam kekuatan maritim harus dibangun menjadi lebih kuat untuk mengamankan seluruh kegiatan instansi kemaritiman. Secara umum, dibutuhkan sinergisme antar instansi kemaritiman dalam menggali, mengolah, dan memanfaatkan segala kekayaan laut yang merupakan suatu kondisi yang harus dapat diciptakan dan dicapai Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Untuk membantu mengimplementasikan visi Indonesia sebagai kebijakan Poros Maritim Dunia inilah kemudian diperlukan Doktrin Maritim. Adapun doktrin maritim yang dimaksud harus berdasarkan prinsip-

prinsip dimana kekuatan maritim diarahkan tindakannya untuk mendukung cita-cita nasional. Selain itu juga doktrin maritim dapat diambil dari pengalaman keterlibatannya secara nasional maupun dalam kancah internasional suatu negara.

Menurut Letkol Laut (P) Salim doktrin maritim Indonesia sebaiknya menggariskan bagaimana peran dan kontribusi TNI AL dalam TNI dan negara secara menyeluruh dan bersama-sama instansi lain dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia. Adapun isi yang terkandung dalam doktrin maritim diantaranya adalah sejarah dan lingkungan maritim Indonesia; kebijakan strategis; konsep strategis maritim; konsep-konsep operasional maritim; luas wilayah operasi maritim; penunjang kekuatan maritim; instrumen pokok kekuatan tempur maritim; penyelenggaraan kampanye maritim; serta kekuatan maritim Indonesia masa depan.¹²

Lombok Treaty yang telah ditandatangani pada tahun 2006, menandakan Indonesia dan Australia telah memiliki perspektif umum untuk meningkatkan keamanan maritim dan

¹² Salim, L. L. (2014). *Kodrat Maritim Nusantara (Catatan Strategis Kemaritiman)*. Yogyakarta: LeutikaPrio. p.278.

meningkatkan kegiatan pertahanan yang telah ada serta aktivitas kerjasama kawasan dan kerjasama di angkatan laut. Kedua negara berbagi kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional serta menangani sengketa teritorial di wilayah tersebut, yang merupakan kondisi prasyarat untuk mencapai PMD Indonesia. Kedua negara, meskipun sering bertentangan namun berada di posisi saling tergantung satu sama lain, terutama dalam kerjasama maritim. Inilah sebabnya mengapa kerjasama maritim bilateral merupakan salah satu jawaban atas PMD di Indonesia.

Implementasi *Comprehensive Partnership* Dalam Kerjasama Indonesia – Australia

Implementasi *comprehensive partnership* dalam kerjasama Indonesia – Australia dapat terlihat dari kerjasama bilateral yang mencakup seluruh bidang serta kerjasama kedua negara dalam forum internasional. Sebelum munculnya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia* pada tahun 2005 yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia yang menjabat saat itu. Menurut pihak Kementerian Luar Negeri¹³, di bawah

¹³ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri. (2013). *Isu*

kemitraan strategis Indonesia – Australia, berbagai macam bidang kerjasama telah dimajukan. Bidang kerjasama yang paling menonjol adalah bidang kejahatan transnasional, dimana Indonesia – Australia menjalin hubungan erat dalam pemberantasan terorisme dan penanganan migrasi ilegal. Di samping itu, interaksi antar masyarakat kedua negara dalam hal pendidikan dan pariwisata juga berjalan intensif dan *frequent*.

Comprehensive partnership memiliki konsekuensi bahwa kerjasama bilateral antara kedua negara dilakukan secara menyeluruh dan meliputi hampir atau seluruh bidang. Artinya bahwa kerjasama bilateral kedua negara tidak hanya mengenai unsur-unsur yang dirasa strategis saja, namun pula mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan serta sosial dan budaya. Hubungan Indonesia – Australia sebagai *comprehensive partnership* sendiri dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang mencakup hampir seluruh bidang di antaranya politik, ekonomi, sosial daya dan

Global dalam Kemitraan Strategis Indonesia: Peningkatan Kerjasama pada Penanganan Isu Global untuk Mendukung Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri.

pembangunan, pendidikan dan pertahanan. Kerjasama ini melibatkan instansi pemerintah baik kementerian dan lembaga negara, serta sektor swasta secara formal melalui perjanjian, kerangka kerjasama dan dialog.

Diplomasi Pertahanan Indonesia – Australia

Secara umum perbedaan antara diplomasi pertahanan lama dengan diplomasi pertahanan yang baru menurut Andrew Cottey adalah jika diplomasi pertahanan yang lama menggunakan mengembangkan realpolitik untuk melawan musuh, diplomasi pertahanan yang baru mengembangkan perjanjian dengan negara lawan potensial, mendukung demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan HAM, serta memungkinkan negara untuk berhadapan dengan masalah keamanannya sendiri. Diplomasi pertahanan meliputi aktivitas yang luas (dulu dideskripsikan sebagai kerjasama militer atau bantuan militer). Dalam hubungan diplomasi pertahanan Indonesia – Australia, aktivitas diplomasi pertahanan yang terjadi adalah sebanyak 7 dari 10 aktivitas diplomasi pertahanan. Aktivitas tersebut sebagian besar telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, namun dapat terlihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia - Australia

| No | Aktivitas Diplomasi Pertahanan | Diplomasi Pertahanan Indonesia – Australia |
|----|--|--|
| 1 | Kontak bilateral dan multilateral antara militer senior dan pejabat pertahanan sipil | <i>High Level Committee, service-to-service talk</i> di ketiga matra |
| 2 | Penunjukan atase pertahanan ke luar negeri | Ada dan bersifat resiprokal |
| 3 | Perjanjian kerja sama pertahanan bilateral | Terdapat <i>Arrangement between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defence of Australia for the Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation and Its Plan of Action on Defence Cooperation</i> tahun 2012 |
| 4 | Pelatihan tentara asing dan personel pertahanan sipil | Pelatihan bahasa asing dan latihan lain |
| 5 | Penyediaan ahli dan penasihat pada kontrol demokratis atas angkatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer | - |
| 6 | Kontak dan pertukaran antara personil militer dan satuan, dan kunjungan kapal | Ada dan rutin dilakukan setiap tahunnya |
| 7 | Penempatan personil militer atau sipil di negara-negara mitra kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata | - |
| 8 | Penempatan tim pelatihan | - |
| 9 | Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya | Pembangunan depot pemeliharaan 4 pesawat angkut militer Hercules C-130 (hibah Australia untuk Indonesia) |
| 10 | Latihan militer bilateral atau multilateral untuk tujuan pelatihan | Ada, baik latihan yang bersifat tahunan maupun dua tahun sekali, selain itu juga terdapat banyak latihan militer secara multilateral. |

Sumber: diolah penulis

Sejauh ini Indonesia dan Australia berfokus pada roadmap pengembangan hubungan bilateral melalui forum *Indonesia – Australia Ministerial Forum* (IAMF). Pembangunan signifikan dalam peningkatan tempo dan bidang kerjasama terjadi dalam rentang waktu 2010-2013. Hal tersebut ditandai dengan berbagai

mekanisme dialog baru, yaitu: *Annual Leaders' Meeting*, sejak tahun 2010, *Australia — Indonesia Dialogue*, sejak tahun 2011, dan *Annual '2+2' Meeting of Foreign and Defence Ministers*, sejak tahun 2012 (Hill). Indonesia – Australia juga memiliki berbagai forum dialog seperti *Forum Dialog Pertahanan Strategis*

Indonesia – Australia atau *Indonesia – Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD) dan *Foreign Affairs and Defence Ministers Meeting* (Forum 2+2).

Menurut Idil Syawfi (Syawfi, 2009), diplomasi pertahanan dilakukan untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan. Defenisi diplomasi pertahanan sendiri adalah merupakan penggunaan usaha-usaha yang dilakukan negara dalam mencapai tujuan pertahanannya sesuai dengan kepentingannya menggunakan semua instrumen diplomasi dari sejak melakukan kontak, kerjasama, kemitraan hingga pengaturan bersama dengan negara lain. Diplomasi pertahanan dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang paling dalam untuk mencapai kebutuhan tersebut. Kemudian diplomasi pertahanan suatu negara memiliki tiga karakter utama yaitu:¹⁴

1. *Defence diplomacy for Confidence Building Measures*

2. *Defence diplomacy for defence capabilities*

3. *Defence diplomacy for defence industry*

Berdasarkan pendapat tersebut maka hubungan diplomasi pertahanan Indonesia – Australia lebih berperan dalam meningkatkan CBM. Meskipun terdapat karakter diplomasi pertahanan RI – Australia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan, yaitu dalam hal pemberian bantuan Australia senilai US\$ 38 juta untuk pemberantasan kejahatan transnasional serta pembangunan sekolah pusat antiteror di Indonesia. Selain itu juga terdapat karakter diplomasi pertahanan RI – Australia dalam meningkatkan industri pertahanan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kunjungan Menteri Pertahanan Australia pada 18 September 2008 kepada Menteri Pertahanan Indonesia yang sama-sama menyepakati agar kedua negara melakukan kerjasama dalam hal industri pertahanan yang prinsipnya mengarah kepada produksi bersama. Namun, penggunaan diplomasi pertahanan untuk karakter peningkatan CBM lebih terlihat dan berkembang daripada dua karakter lainnya. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aktivitas diplomasi pertahanan antara Indonesia – Australia.

¹⁴ Syawfi, I. (2009). *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia.p. 14.

Upaya peningkatan CBM yang dilakukan adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan Australia, yang khususnya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar Indonesia – Australia dengan saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga tidak menjadi dan/atau dianggap ancaman oleh masing-masing negara. Tujuan akhir dari diplomasi pertahanan untuk membangun CBM ini adalah untuk menumbuhkan kondisi moral yang saling mempercayai (*mutual trust*) para pihak, atau dalam hal ini antara Indonesia dan Australia.

Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia di Bidang Keamanan Maritim

Sebagai negara kepulauan, Republik Indonesia memiliki titik-titik kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara *illegal* demi kepentingannya, baik kegiatan di bidang perikanan, *minning, logging, smuggling, sea piracy* maupun yang bersifat *trans national crime*. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan berbagai forum diskusi dan simposium, serta berbagai latihan bersama baik yang bersifat bilateral, maupun bersifat multilateral untuk mengatasi kerawanan di bidang maritim dan untuk meningkatkan stabilitas di kawasan. Adapun latihan dan/atau operasi militer Indonesia – Australia di bidang maritim adalah sebagai berikut:

Tabel Latihan dan Operasi Militer Indonesia dan Australia di Bidang Maritim

| No | Latihan atau Operasi Bilateral Indonesia – Australia | Latihan atau Operasi Multilateral yang diikuti Indonesia dan Australia |
|----|--|--|
| 1 | Latihan Cassowary (Joint Navy Exercise Cassowary) | Multilateral Naval Exercise KOMODO (MNEK) |
| 2 | Patroli Terkoordinasi Australia – Indonesia (PATKOR AUSINDO) | Latihan Bersama AMAN (Exercise AMAN) |
| 3 | Latihan New Horizon | Exercise KAKADU |
| 4 | - | Western Pacific Mine Countermeasure Exercise (WP MCMEX) |
| 5 | - | Pacific Partnership |
| 6 | - | Join Mine Exercise (MINEX) |
| 7 | - | Diving Exercise (DIVEX) |
| 8 | - | The Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC) |

Sumber: diolah penulis

Kesimpulan

Dinamika hubungan bilateral Indonesia – Australia yang naik turun adalah konsekuensi dari kedua pemerintah yang lebih terfokus pada dinamika bilateral mereka. Fokus yang sempit ini membuat Australia dan Indonesia mengabaikan bahwa Indonesia dan Australia benar-benar berbagi berbagai prioritas yang sama dalam konteks regional. Memfokuskan kembali dari perbedaan bilateral menuju kesamaan kepentingan regional adalah salah satu jalan terbaik menuju hubungan Australia-Indonesia lebih stabil dan tangguh. Sebagai *middle powers* dalam tatanan regional, Australia dan Indonesia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Meningkatkan rasa saling pengertian tentang bagaimana Australia dan Indonesia berbagi prioritas yang saling melengkapi dapat membantu meningkatkan ketahanan hubungan diplomasi kedua negara dalam hubungan bilateral yang tak terelakkan. Hal ini semakin diakui oleh para pemimpin di kedua negara salah satunya dengan peningkatan kerjasama sejak pernyataan kedua negara sebagai *comprehensive partnership* melalui *Joint Declaration on*

Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia tahun 2005.

Di bidang pertahanan, *comprehensive partnership* dapat dilihat dari banyaknya kerjasama, dialog dan forum, serta berbagai pelatihan dan latihan bersama. Hal ini terimplementasi dengan baik pada hubungan bilateral Indonesia – Australia sebagai *comprehensive partnership*. Dengan terwujudnya *comprehensive partnership* maka diplomasi pertahanan pun sudah berjalan dengan baik karena berbagai aktivitas diplomasi pertahanan dapat diwujudkan dalam kerangka *comprehensive partnership* ini. Diplomasi pertahanan di bidang maritim dapat terlihat dari komprehensifnya berbagai perjanjian, serta kerjasama militer di bidang maritim, baik yang bersifat bilateral juga latihan militer yang bersifat multilateral yang diikuti Indonesia – Australia yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas kawasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Perkembangan Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Dalam Lima Tahun Mendatang*. Jakarta : Direktorat

Jenderal Strategi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan.

Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). *Arungi Samudra Bersama Sang Naga (Sinergi Poros Maritim Dunia Dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Salim, L. L. (2014). *Kodrat Maritim Nusantara (Catatan Strategis Kemaritiman)*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri. (2013). *Isu Global dalam Kemitraan Strategis Indonesia: Peningkatan Kerjasama pada Penanganan Isu Global untuk Mendukung Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri.

Syawfi, I. (2009). *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Dokumen Resmi

Australian Government, D. o. (2005, April). Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia. Dipetik 6 Mei 2016, dari <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia.aspx>

Defence Ministry of the Republic of Indonesia. (2015). *Defence White Paper 2015*. Jakarta: Defence Ministry of the Republic of Indonesia.

Department of Defence, Australian Government. (2016). *Defence White Paper 2016*. Australia: Departement of Defence.

Jurnal

Bhakti, I. N. (n.d.). Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang. *Jurnal Tahunan CIDES*, 2/1996, 296.

Media Elektronik

Syafputri, E. (2015, Mei 1). Indonesia Terlalu Penting Untuk Australia. (J. M. Sidik, Ed.) Indonesia. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/493860/indonesia-terlalu-penting-untuk-australia>.

Conversation, T. (2016, September 8). To Improve Their Relationship Australia and Indonesia Should Focus On Shared Geopolitical Interest. *The Conversation*. (D. Willis, Ed.) Retrieved from <http://theconversation.com/to-improve-their-relationship-australia-and-indonesia-should-focus-on-shared-geopolitical-interests-64614>.